

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Dalam menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan keterkaitan antara keduanya, penulis menggunakan tinjauan literatur. Penulisan karya tulis ilmiah, terutama skripsi, tidak ada tulisan yang bersifat benar-benar baru yang dihasilkan oleh penulis, maka penulis memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

**Tabel 1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminisme	Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah	Persamaan dalam literatur dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai peran UN Women sebagai organisasi internasional yang mengedepankan	Objek penelitian yang berbeda, dimana literatur ini objek yang dibahas adalah bagaimana peran UN Women pada implementasi paradigma feminisme.

			peran dan kepentingan perempuan.	
2	<i>Concept and Types of Women Empowerment</i>	Keshab Chandra	Persamaan dalam literatur dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan jaminan hak-hak hidupnya.	Subjek penelitian yang berbeda, yang mana literatur ini hanya membahas konsep pemberdayaan perempuan saja.
3	Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender sebagai Tantangan Utama <i>Good Governance</i> di India	Winny Permataningtyas	Persamaan dalam literatur dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai masalah	Membahas mengenai korupsi dan ketidaksetaraan gender yang menjadi tantangan utama di India.

			kesetaraan gender di India.	
4	India dalam Dunia Pendidikan	Wanada Rezeki, Tita Amalia, dan Khovivah Ananda Putri	Persamaan dalam literatur dan penelitian ini sama-sama membahas pentingnya pendidikan bagi masyarakat India.	Subjek penelitian yang berbeda, yang mana penellitian dan literatur ini membahas tentang pendidikan di India saja.

Penelitian pertama dari jurnal *Asia Pacific Studies* pada tanggal 8 Desember 2018 oleh Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah yang berjudul **“Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminisme”**. Dalam penelitian tersebut, penulis mengelaborasi peran UN Women pada implementasi paradigma Feminisme sebagai Organisasi Internasional yang menyuarakan dan mewujudkan hak-hak perempuan yang berkaitan dengan kekerasan dan ketidaksetaraan gender. Dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, UN Women bekerjasama dengan negara-negara dalam tingkat global untuk memajukan kerangka normatif internasional. Salah satu program UN Women dalam mengatasi kekerasan adalah program *Safe Cities Free from Violence Against Women and Girls* yang didirikan di Ekuador, Mesir, India, Rwanda, dan

negara lainnya yang dimana program ini dapat menangani permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Sebagai organisasi yang mengedepankan peran dan kepentingan perempuan, kehadiran UN women akan relevan dengan paradigma feminsme yang berfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta konsekuensinya terhadap politik dunia karena hubungan laki-laki dan perempuan terletak pada adat *maskulinitas* dan *feminitas* yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tulisan ini juga menganalisis konsep gender dengan pendekatan keaman feminis serta kritik feminis terhadap paradigma Realisme dan Liberalisme. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun belum mengalami peningkatan yang signifikan, upaya UN Women dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dinilai cukup efektif untuk menangani permasalahan perempuan di dunia.

Penelitian kedua dari jurnal *Intenational Forum of Teaching and Studies* (IFOTS) terbitan tahun 2013 oleh Keshab Chandra Mandal yang berjudul “***Concept and Types of Women Empowerment***”. Penelitian ini menjelaskan definisi, jenis, dan pentingnya pemberdayaan perempuan. Istilah pemberdayaan itu sendiri adalah suatu proses sosial dalam membantu seseorang untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka sendiri, lebih jauh lagi pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses menumbuhkan kekuatan pada seseorang untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas, dan lingkungan masyarakat. Isu pemberdayaan perempuan saat ini menjadi suatu kajian yang penting dalam program dan kegiatan PBB, Lembaga pemerintah, dan non-pemerintah. Pemberdayaan perempuan tidak hanya penting, melainkan menjadi suatu keharusan yang dapat meningkatkan pembangunan negara secara menyeluruh. Penulis pada penilitannya mengutip

pendapat Sushama Sahay (1998), yaitu pemberdayaan merupakan suatu proses yang multi-dimensi yang dapat menyadarkan perempuan akan kekuatan penuh dan identitas mereka di semua bidang kehidupan. Dalam penelitian ini, pemberdayaan perempuan saat ini memiliki lima bagian utama yaitu, pemberdayaan sosial, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, dan pemberdayaan psikologis. Populasi perempuan di dunia terdiri dari 50% dari total populasi dunia, tetapi kedudukan mereka di badan legislatif nasional kurang dari 12% kursi. Hanya 14 negara dari 177 negara dunia yang menempatkan perempuan di lebih dari 30% kursi parlemen nasional mereka. Hal tersebut menunjukkan betapa sulitnya perempuan mendapatkan hak-hak yang setara untuk kemajuan negara mereka sendiri. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting karena keberadaan perempuan masih banyak yang terbelakang dan hanya sedikit kemajuan yang terjadi dalam status dan posisinya dalam masyarakat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut kaum perempuan mendapatkan kesetaraan dan jaminan hak-hak hidupnya.

Penelitian ketiga dari jurnal *Academia Praja: Jurnal Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* pada bulan Februari tahun 2021 oleh Winny Permataningtyas yang berjudul **“Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender sebagai Tantangan Utama *Good Governance* di India”**. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa isu ketidaksetaraan gender dan korupsi menjadi suatu masalah yang sulit dihilangkan di India, kedua indikator tersebut menjadi penyebab sulit terwujudnya tata kelola global yang baik di India. Kasus korupsi di India masih kerap terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, India menempati posisi ke 80 dari 180 negara pada *Corruption Perception Index* (CPI). Kasus korupsi di India menimbulkan

masalah yang memprihatinkan bagi masyarakat India karena menyebabkan meningkatnya kemiskinan, meningkatnya isu kelaparan, rendahnya tingkat kesejahteraan hidup, dan rendahnya keadilan hukum di India. Pada penelitian ini, korupsi dan ketidaksetaraan gender menjadi suatu korelasi karena rendahnya partisipasi perempuan khususnya pada pembentukan kebijakan suatu negara akan menunjukkan tingginya tingkat korupsi di negara tersebut. Partisipasi politik perempuan menjadi suatu hal yang penting karena dapat menyuarakan hak-hak perempuan yang selama ini cenderung diabaikan. Adanya gender gap di India mengakibatkan perempuan di negara tersebut sulit mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapat kursi pemerintahan yang di dominasi oleh kaum laki-laki. Partisipasi politik perempuan India juga cenderung kurang, hal tersebut dikarenakan kurang terbukanya pola pikir mereka akan pentingnya pendidikan dan pekerjaan yang berkualitas. Untuk menciptakan tata kelola global yang baik, perlu adanya pemberdayaan perempuan berskala besar di India guna membentuk pola pikir yang baru untuk perempuan mendapatkan hak-hak mereka dan mengurangi tindakan korupsi di negara tersebut. Penelitian keempat dari jurnal *Dinamika Pendidikan* pada tanggal 25 April tahun 2020 oleh Wanada Rezeki, Tita Amalia, dan Khovivah Ananda Putri yang berjudul **“India dalam Dunia Pendidikan”**. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan sistem pendidikan di India sebagai negara dengan kepadatan penduduk sekitar 600 juta jiwa. India menerapkan sistem pendidikan 10 tahun untuk sekolah dasar, 2 tahun sebagai persiapan perguruan tinggi, dan 3 tahun untuk jenjang perguruan tinggi. Kehadiran penjajahan Inggris atas wilayah India menjadi pengaruh latar belakang pendidikan di negara tersebut. Pemerintah India membentuk lembaga-lembaga pendidikan

dalam membantu kurikulum pendidikan yang baik. Pendidikan gratis bagi anak berusia 6-14 tahun diberikan oleh pemerintah India sebagai upaya pemerintah dalam pendidikan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pekerja paksa dibawah umur, meskipun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud karena kondisi ekonomi India yang sangat terpuruk.

## **2.2.Kerangka Konseptual**

### **2.2.1.Global Governance**

Hadirnya konsep tata pemerintahan global (*global governance*) pada tahun 1990-an bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan perubahan sistem yang ada di dunia. Kajian dari tata kelola global adalah tentang perubahan apa yang telah, belum, dan bisa terjadi dalam upaya menangani masalah lintas batas bersama karena tata kelola global bersifat dinamis. Untuk memberikan solusi atas banyak masalah, tata kelola global sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan saat ini. Pertumbuhan tersebut meliputi globalisasi, kemajuan teknologi, berakhirnya perang dingin, dan proses transnasionalisme yang dilalui individu dan para aktor non-negara yang bekerja sama melintasi batas negara. Hal tersebut ditunjukkan seperti adanya kegiatan masyarakat sipil global, NGO, jaringan advokasi transnasional, dan gerakan sosial transnasional (Karns, 2015).

Tata kelola global meliputi berbagai peraturan dan solusi penyelesaian masalah secara kooperatif untuk menyelesaikan konflik yang dibuat oleh negara dan aktor lain, mencapai tujuan bersama, dan mencegah ketidakefektifan pada situasi berkegantungan yang dibentuk sebagai IGO (*Intergovernmentall Organization*) dan NGO (*Non-Governmental Organization*). IGO dan NGO meningkatkan kesejahteraan individu dan kelomok yang saat ini IGO sudah banyak berintegrasi

proyek bersama NGO, terutama di bidang pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Dalam kerjasama yang dijalin, IGO dan NGO membantu kepentingan yang dipegang oleh negara dan aktor lain. Fungsi IGO, khususnya PBB yaitu mengembangkan ideologi dan konsep mengenai keamanan dan pembangunan ekonomi dan sosial. Bukan hanya menciptakan peluang untuk negara anggotanya saja, namun IGO memberi pengaruh dan memberikan batasan terhadap proses dan kebijakan negara anggotanya dan juga mempengaruhi negara-negara anggota untuk menetapkan agenda internasional maupun secara nasional untuk mengambil posisi dan isu-isu. Setiap negara anggota IGO harus menyelaraskan kebijakannya jika ingin mendapatkan keuntungan timbal balik dengan mengikuti prinsip, norma, dan aturan perilaku yang difasilitasi oleh IGO (Karns, 2015).

Dalam tradisi klasik, teori liberal berpendapat bahwa pada dasarnya sifat manusia itu baik, kemajuan sosial sangat memungkinkan, dan institusi dapat menyempurnakan perilaku manusia. Bagi kaum liberal, organisasi internasional memainkan sejumlah peran termasuk berpartisipasi pada kerja sama dan berfungsi sebagai arena negosiasi dan koalisi. Organisasi internasional menurut kaum liberal adalah instrumen utama dalam mengurangi bahaya perang, mengembangkan norma bersama, dan meningkatkan ketertiban dengan melakukan kegiatan fungsional untuk membantu dan mengatasi masalah internasional yang substantif dan dapat menjadi bagian dari rezim internasional. Kaum liberal memandang individu manusia adalah aktor utama dan negara adalah aktor kolektif yang sangat penting, namun individu dan negara menjadi aktor yang menghargai perbedaan bukan hanya kesatuan dengan arti lain, prinsip moral dan etika, hubungan kekuasaan, kondisi internasional yang berubah dapat membentuk kepentingan dan kebijakan negara.



Selain itu, IGO juga berfungsi sebagai operasional dengan mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis, dan mengerahkan pasukan (Karns, 2015).

Dari waktu ke waktu, landasan kontemporer pemerintahan global mengalami revolusi baik melalui negara itu sendiri mau pun seperangkat aturan internasional yang semakin kompleks. Pada abad ke-19, pemerintahan global diawali dengan runtutan perkembangan organisasi pemerintah. Pada abad ke-20, berkembangnya IGO dan lembaga peradilan internasional. Dan di abad ke-21 berevolusinya lembaga-lembaga dalam pemenuhan kebutuhan yang terus berkembang untuk tata kelola global (Karns, 2015).

Sebagai satu-satunya IGO dengan ruang lingkup global, keanggotaan yang hampir universal, serta keagendaan yang mencakup isu tata kelola yang paling luas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) telah menjadi pusat pemerintahan global sejak Perang Dunia II. Fungsi dari PBB diantaranya adalah menciptakan hukum, norma, dan prinsip internasional yang kemudian menghadirkan IGO lain dari sistem PBB serta banyaknya delegasi dan program yang menjasi sponsor pada konferensi maupun pertemuan global. Secara sederhana, PBB merupakan pusat diplomasi multilateral. Landasan prinsip PBB adalah persamaan kedaulatan negara anggota yang dimana setiap negara tidak mengakui otoritas pemerintahan yang lebih tinggi (Karns, 2015).

Sejalan dengan fungsi IGO, UN Women memiliki fungsi sebagai operasional karena dalam UN Women mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis, dan mengerahkan pasukan atau anggotanya untuk mencapai keberhasilan mewujudkan kesetaran gender dan pemberdayaan perempuan.

### **2.2.2 Feminisme Liberal**

Feminis merupakan pandangan yang hadir atas kritis terhadap realis dan liberalis yang terlalu maskulin. Feminis mendefinisikan gender sebagai suatu konstruksi sosial yang membentuk karakteristik mengenai bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku, karakteristik tersebut berkaitan dengan maskulinitas dan karakteristik perempuan yang dianggap lemah, emosional, dan relasional. Kajian utama dari feminisme adalah adanya partisipasi perempuan dalam peran domestik. Peranan perempuan mengalami kesenjangan dan diskriminasi dalam sektor ekonomi karena perempuan hanya dihargai dengan upah yang kecil meskipun beban pekerjaannya sama dengan yang dikerjakan laki-laki, sehingga hal tersebut menciptakan banyak pertanyaan akan nilai dan norma perempuan dalam kehidupan sosial (Ramadhan, 2018).

Liberalisme bertumpu pada ideologi Yunani mengenai individu sebagai manusia yang rasional dan memiliki kapasitas untuk memperbaiki kondisi mereka dengan menciptakan masyarakat yang adil. Sejak tahun 1990-an, aliran baru teori liberal telah berkembang dan menarik perhatian pada peran perempuan dalam pemerintahan global secara variabel independent ataupun dependen. Para feminis positivisme berpendapat bahwa banyak teori hubungan internasional, termasuk teori liberal yang sudah mengabaikan posisi perempuan yang secara historis, kurangnya keterwakilan perempuan pada peran kekuasaan. Feminis liberal menyerukan peningkatan perhatian terhadap pengembangan kebijakan organisasi yang berpengaruh untuk perempuan, terutama peran perempuan pada pembangunan ekonomi, diskriminasi dan kejahatan bagi perempuan, serta perempuan dalam situasi konflik bersenjata (Karns, 2015).

Teori hubungan internasional menurut feminisme, berkembang pada cakupan prasangka maskulin dengan tiga tingkatan analisis yaitu manusia, negara, dan perang. Feminis liberal memiliki keinginan untuk menjadikan perempuan lebih terkenal dalam politik dunia, memberikan akses yang sama pada pengaruh dan kekuatan laki-laki dan perempuan sehingga tercapainya hak yang sama bagi pria maupun wanita. Pentingnya hak—hak liberal atas dasar atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan ditekankan oleh feminisme liberal agar laki-laki dan perempuan mendapat tindakan yang sama (Karim, 2014).

Feminis liberal memiliki ambisi untuk hak-hak yang sama pada perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan sebagai manusia. Aliran feminisme liberal berlandaskan dari filsafat liberalism yang memiliki konsep bahwa kebebasan adalah hak setiap individu, maka setiap individu tersebut diberikan kebebasan untuk menentukan tanpa merasa terkekang oleh pendapat umum dan hukum (Karim, 2014).

Pemberdayaan perempuan menjadi suatu hal yang diperjuangkan oleh kaum feminis. Pemberdayaan menurut konsepnya berasal dari kata daya yang berarti kekuatan, terjemahan dari “*empowerment*” dalam bahasa Inggris. Konsep pemberdayaan berarti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar (Hamid, 2018).

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang multi-dimensi yang dapat menyadarkan perempuan akan kekuatan penuh dan identitas mereka di semua bidang kehidupan. Pemberdayaan perempuan memiliki lima bagian utama yaitu,

pemberdayaan sosial, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, dan pemberdayaan psikologis(Mandal, 2013).

Pembangunan suatu negara menjadi salah satu tujuan atas partisipasi perempuan dalam menuntut persamaan hak, karena perempuan sejatinya memiliki kemampuan yang luar biasa untuk kemajuan bangsanya di bidang ekonomi dan pendidikan sehingga melahirkan kualitas diri yang baik agar dapat menempatkan posisi pada peran yang sangat penting. Dengan adanya pemberdayaan perempuan, kaum perempuan akan diberikan kesempatannya untuk mendapatkan kesempatan agar mendapatkan kualitas diri dan kesetaraan hak.

### **2.2.2. Pendidikan dan Vokasi (*Education and Vocational*)**

Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan dan vokasi, terlebih dahulu perlu diketahui istilah keduanya. Menurut Prof.Richey, dalam bukunya yang berjudul “*Planning for Teaching, an Intrroduction to Education*” menyatakan bahwa pendidikan berhubungan dengan fungsi yang luas pada pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat untuk membawa generasi yang baru bagi pada kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Secara sederhana, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha manusia dalam menumbuhkan mengembangkan kemampuan jasmani ataupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang melekat di masyarakat. Pendidikan menjadi suatu usaha yang terencana untuk menciptakan proses pembelajaran untuk lebih mengembangkan potensi peserta didik secara aktif untuk memiliki nilai keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan(Masrurorh, 2017).

Vokasi, secara linguistik berasal dari bahasa Inggris yaitu *vocational* yang berarti pekerjaan dengan kata kerja “juru”. Secara terminologi, *vocational* adalah

pendidikan yang dapat menciptakan tenaga ahli yang mampu bekerja secara professional, istilah umumnya yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan vokasi bertujuan untuk membentuk keterampilan yang lebih professional untuk masyarakat agar lebih terampil dan lebih siap dalam menempuh jenjang pekerjaan. Pendidikan vokasi memiliki banyak bidang yang dapat dipilih untuk berfokus pada penguasaan suatu keahlian terapan(Sudarmaji, 2021).

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Dari hasil literatur review dan kerangka teoritis, maka peneliti membuat asumsi sebagai berikut:

**“Dalam tata kelola global, UN Women berperan sebagai *Intergovernmental Organization* yang berfungsi sebagai organisasi operasional dalam memberdayakan perempuan di India melalui program *Second Chance Education and Vocational Learning Programme*, sehingga pendidikan dan keterampilan perempuan di negara tersebut dapat meningkat.”**

## 2.4. Kerangka Analisis

